

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA
PINTAR (PIP) DI INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN
KOTA BINJAI**

TESIS

Oleh

MUHAMMAD HAEKAL LUBIS

NPM. 231801005



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCA SARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)31/7/26

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA
PINTAR (PIP) DI INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN
KOTA BINJAI**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**



MUHAMMAD HAEKAL LUBIS

NPM. 231801005

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)31/7/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di Institut Syekh Abdul Halim Hasan di Kota Binjai

N a m a : Muhammad Haekal Lubis

N P M : 231801005

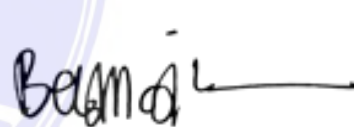
MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP., M.AP

Pembimbing II



Dr. Beby Masitoh Batubara, S.Sos., M.AP

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Adam, SE., M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 11 April 2026

Nama : Muhammad Haekal Lubis

NPM : 231801005



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
Sekretaris	: Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP
Pembimbing I	: Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Pembimbing II	: Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP
Penguji Tamu	: Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis dengan judul ***Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di Institut Syekh Abdul Halim Hasan di Kota Binjai*** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di suatu Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2026



Muhammad Haekal Lubis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Haekal Lubis
NPM : 231801005
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

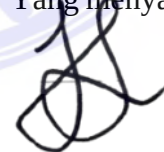
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di Institut Syekh Abdul Halim Hasan di Kota Binjai

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Muhammad Haekal Lubis

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DI INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN DI KOTA BINJAI

Nama : Muhammad Haekal Lubis
NPM : 231801005
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Institut Syekh Abdul Halim Hasan di Kota Binjai. Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan secara layak dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan PIP memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, pihak institusi pendidikan, serta penerima bantuan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak pengelola program, pimpinan institusi, staf administrasi, dan mahasiswa penerima Program Indonesia Pintar. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek penyaluran bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria. Program ini memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan pendidikan mahasiswa, mengurangi beban biaya pendidikan, serta meningkatkan motivasi belajar mahasiswa penerima bantuan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sosialisasi program, proses administrasi yang cukup panjang, serta keterlambatan pencairan dana bantuan. Selain itu, validasi data penerima bantuan juga menjadi tantangan dalam memastikan ketepatan sasaran program.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, Pendidikan, Mahasiswa, Kota Binjai.

ABSTRACT

PERFORMANCE OF THE SUPPLEMENTAL FEEDING PROGRAM IN THE PREVENTION OF STUNTING IN THE MEDAN TIMUR DISTRICT

Name : Muhammad Haekal Lubis
NPM : 231801005
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, MAP
Supervisor II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

This study aims to analyze the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) policy at the Syekh Abdul Halim Hasan Institute in Binjai City. The Smart Indonesia Program is a government policy aimed at improving access to education for students from low-income families so they can continue their education properly and sustainably. Implementing the PIP policy requires good coordination between the government, educational institutions, and aid recipients to optimally achieve the program's objectives.

The research method used was descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The informants included program managers, institutional leaders, administrative staff, and students receiving the Smart Indonesia Program. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the implementation of the Smart Indonesia Program policy at the Syekh Abdul Halim Hasan Institute in Binjai City has been quite successful, particularly in the distribution of educational aid to eligible students. This program has had a positive impact on the continuity of students' education, reducing the burden of educational costs, and increasing the learning motivation of recipients. However, several obstacles remain in its implementation, such as limited program outreach, a lengthy administrative process, and delays in disbursement of aid funds. Furthermore, validating recipient data is a challenge in ensuring accurate program targeting.

Keywords: Policy Implementation, Smart Indonesia Program, Education, Students, Binjai City.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Kinerja Program Pemberian Makanan Tambahan dalam Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Timur”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari teknik penulisan maupun kedalaman materinya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

Medan, April 2026
Penulis



Muhammad Haekal Lubis

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Impementasi	12
2.2 Model Implementasi Kebijakan	15
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	18
2.4 Program Indonesia Pintar (PIP).....	20
2.4.1 Prinsip Pelaksanaan Program Indonesia Pintar	21
2.4.2 Sasaran Program Indonesia Pintar.....	21
2.4.3 Kewajiban Penerima Program Indonesia Pintar.....	22
2.5 Penelitian Terdahulu	23
2.6 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Sumber Data	29
3.4 Informan Penelitian	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai	35
4.1.1. Profil Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai.....	35
4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai	37
4.1.3. Struktur Organisasi	38

4.2. Pembahasan.....	39
4.2.1. Hasil Wawancara Penelitian.....	39
4.2.2. Analisis Program Indonesia Pintar di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai	54
4.2.3. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Indonesia Pintar di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga nilai, moral, serta karakter yang menjadi dasar dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Pemerintah Indonesia menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, dalam realitas sosial, akses masyarakat terhadap pendidikan masih menghadapi berbagai kendala, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Banyak siswa dan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi kesulitan melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di beberapa daerah. Dengan permasalahan yang ada, tentunya masyarakat mengharapkan keadilan dari pemerintah, untuk segera mengambil tindakan atau solusi bagi keluarga yang tidak mampu menyekolahkan putra-putrinya yang karena faktor ekonomi atau tidak mampu untuk melanjutkan Pendidikan para putra-putrinya. Menyikapi hal tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan afirmatif di bidang pendidikan, salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP).

Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran keterampilan, pengetahuan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melintasi pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan dapat juga dilakukan secara otodidak, namun sering terjadi di bawah bimbingan orang lain. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia merupakan mencerdaskan kehidupan bangsa, dari setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang begitu layak dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi kendala utama bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut. Kemiskinan yang dialami masyarakat menyebabkan tingginya angka putus sekolah pada anak-anak. Pernyataan ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa faktor dominan penyebab putus sekolah adalah faktor ekonomi.

Tujuan pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar belum sepenuhnya terwujud karena tidak semua warga Negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Salah satu faktornya adalah masalah kemiskinan. Menurut data BPS Maret 2023, proporsi masyarakat miskin di Indonesia mencapai 9,36% (setara 25,90 juta penduduk), menurun 0,21% (setara 0,46 juta penduduk) dari September 2022. Proporsi penduduk miskin di perdesaan per Maret 2023 sebesar 12,22%. Sedangkan, di perkotaan 7,29% pada Maret 2023. Berdasarkan data penduduk miskin diatas, pemerintah berupaya agar setiap peserta didik Indonesia dapat menempuh tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan kewenangan kepada pemerintahan untuk mewujudkan keadilan, keterjangkauan, dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu terkait manfaat kemajuan sosial, kemakmuran, dan kemandirian. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki kewajiban dalam menumbuhkembangkan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi, melatih muda-mudi Indonesia yang berdaya saing dan cerdas sebagai sumber daya manusia yang unggul dan berperan bagi pembangunan bangsa. Adapun upaya pemerintah dalam mengembangkan peluang belajar di perguruan tinggi dengan cara mendukung dalam bentuk program beasiswa.

Program Indonesia Pintar adalah salah satu contoh dari implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memperhatikan anak-anak di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia sekolah yang dianggap tidak mampu secara ekonomi. Program ini memberikan bantuan secara tunai untuk biaya pendidikan yang disebut sebagai Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini adalah bukti dari kebijakan pemerintah untuk mewujudkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Program Indonesia Pintar (PIP) sebuah program prioritas Presiden Joko Widodo dan dirancang secara khusus untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu/miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai mereka menyelesaikan pendidikan menengah atas/ sederajat. Program ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Sehat, dan Indonesia Pintar, serta

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Lewat PIP ini kita berharap dapat menutup kesenjangan akses pendidikan untuk anak-anak di Indonesia. Tidak punya alasan lagi bagi anak-anak Indonesia tidak putus sekolah, Ini membantu meringankan pembiayaan pendidikan, mencegah untuk siswa putus sekolah dan membantu siswa putus sekolah. Jumlah pendanaan PIP pada Mahasiswa sebanyak Rp.13,9 Triliun.

Perlu kita ketahui, bahwa bantuan program Indonesia pintar ini hanya disalurkan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat penerima. Hal ini merupakan inovasi kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah untuk mempermudah pelajar/masyarakat dalam mengurus penerimaan biaya bantuan program Indonesia pintar, akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana cara menggunakan website PIP Kemdikbud termasuk para orang tua pelajar.

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai sebagai salah satu perguruan tinggi Islam swasta memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan PIP tersebut. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki mahasiswa dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam, program PIP menjadi sangat relevan dalam membantu mahasiswa yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan. Akan tetapi, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek sosialisasi program, mekanisme penyaluran, maupun verifikasi data penerima manfaat.

Institut Syekh Abdul Hasan Kota Binjai di dirikan pada tahun 1991, Institut Syekh Abdul Hasan Kota Binjai merupakan di pimpin oleh Dr. Abdul Halim

Nasution, MH. Visi Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai adalah INSAN menjadi Perguruan Tinggi yang memiliki kompetensi keilmuan, berwawasan keislaman dan berorientasi global pada tahun 2045. Pada tahun ajaran 2023/2024 pelajar Mahasiswa/I Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai mempunyai peserta didik sebanyak 789 mahasiswa/i yang terdiri dari laki-laki mahasiswa dan perempuan mahasiswi.

Program ini merupakan program kerja sama dengan tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Agama (Kemenag). Dan Institut Syekh Abdul Halim Hasan mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Agama (Kemenag). Berdasarkan data yang tertulis Program Indonesia Pintar Kementerian Agama bahwasanya pada Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai terdapat 45 mahasiswa/I yang terdaftar sebagai penerima surat keterangan nominasi Program Indonesia Pintar (PIP) atau dengan kata lain 45 mahasiswa/i yang layak menerima bantuan PIP. Total Surat Keputusan (SK) nominasi PIP yang telah mengaktifasi atau sudah memiliki tabungan sehingga bisa mendapatkan bantuan dana sebanyak 45 Mahasiswa/I. Sementara itu terdapat 5 mahasiswa/I yang tidak memiliki KIP, tetapi memakai surat keterangan miskin dari domisili kelurahan tempat mereka tinggal. Dari jumlah mahasiswa TA 2023/2024 yang berjumlah 789 mahasiswa/I masih banyak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu namun tidak terdaftar sebagai penerima dana bantuan program KIP.

Berdasarkan sejumlah data diatas dapat dilihat dari jumlah Kuota KIP terlalu sedikit dari jumlah mahasiswa baru TA. 2023/2024, adanya mahasiswa KIP menikah sebelum Studi Selesai sehingga bantuan KIP di berhentikan, dan sebagian

mahasiswa KIP ada yang telat dalam membayar biaya kuliah. Beberapa fenomena yang muncul di lapangan menunjukkan adanya permasalahan seperti kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai prosedur pendaftaran, keterlambatan pencairan dana, serta ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Selain itu, koordinasi antara pihak kampus dengan instansi terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun pihak perbankan penyalur, juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan ini. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar pelaksanaan PIP di perguruan tinggi dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Namun, dalam konteks implementasi kebijakan, masih ditemukan beberapa permasalahan mendasar yang menghambat efektivitas pelaksanaan PIP di perguruan tinggi. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Masih terdapat mahasiswa yang sebenarnya berasal dari keluarga mampu namun memperoleh bantuan, sementara mahasiswa yang lebih membutuhkan justru belum terakomodasi karena kesalahan data atau verifikasi yang kurang optimal.
2. Kurangnya sosialisasi dan informasi. Sebagian mahasiswa tidak memahami mekanisme, persyaratan, dan tahapan pendaftaran PIP/KIP-K, yang menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa potensial penerima bantuan.
3. Keterlambatan pencairan dana. Dalam beberapa periode, dana bantuan terlambat diterima sehingga menghambat mahasiswa memenuhi kebutuhan kuliah tepat waktu.

4. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Sinergi antara pihak kampus, Kemendikbudristek, dan lembaga penyalur (bank) sering kali belum berjalan efektif, sehingga proses administrasi menjadi lambat.
5. Kurangnya monitoring dan evaluasi. Pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan oleh penerima masih minim, sehingga efektivitas dan dampak program sulit diukur secara akurat.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa secara implementatif, kebijakan PIP belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam konteks PIP di Institut Syekh Abdul Halim Hasan, aspek komunikasi dan koordinasi menjadi titik lemah utama yang perlu mendapat perhatian.

Dari persoalan di atas, dapat dirumuskan argumentasi utama dalam penelitian ini, yaitu bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat pelaksana. Implementasi yang tidak efektif akan menurunkan capaian program, bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru dalam distribusi bantuan pendidikan.

Adapun masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai dilaksanakan, faktor apa yang menjadi penghambat dan

pendukung pelaksanaannya, serta sejauh mana program ini memberikan manfaat bagi mahasiswa penerima.

Sebagai solusi awal, diperlukan langkah-langkah strategis seperti:

- a. peningkatan sosialisasi dan transparansi informasi PIP/KIP-K di lingkungan kampus,
- b. perbaikan mekanisme verifikasi data agar tepat sasaran,
- c. peningkatan koordinasi antar pihak terkait (kampus, Kemendikbudristek, dan bank penyalur),
- d. serta pelaksanaan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan dana oleh mahasiswa penerima.

Meskipun telah berjalan selama beberapa tahun, Program Indonesia Pintar masih sangat diperlukan karena masih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang menggantungkan kelangsungan studinya pada program ini. PIP bukan hanya kebijakan bantuan sosial, tetapi juga merupakan bentuk investasi pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Sebagai pembanding, berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023, penerima KIP Kuliah di tingkat nasional mencapai sekitar 985.000 mahasiswa, dengan nilai bantuan Rp2,4 juta hingga Rp8,4 juta per semester, tergantung akreditasi program studi. Sementara itu, beasiswa lain seperti Beasiswa Unggulan dan Beasiswa LPDP lebih berfokus pada peningkatan mutu akademik dan pengembangan profesional, bukan bantuan bagi keluarga miskin. Dengan demikian, KIP-K atau PIP memiliki fungsi yang berbeda dan masih dibutuhkan, karena menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi.

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini telah diimplementasikan sesuai dengan pedoman dan prinsip kebijakan publik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak kebijakan terhadap mahasiswa penerima manfaat.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kampus dan pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan PIP, sehingga program ini benar-benar menjadi instrumen pemerataan kesempatan pendidikan dan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis dalam memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar di tingkat perguruan tinggi, khususnya di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari urian latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar khususnya pada Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai?
2. Apa faktor penghambat dalam Implementasi Program Indonesia Pintar di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah di sebutkan, maka dalam

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar khususnya pada Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai.
2. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Indonesia pintar di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara akademis, kajian ini diharapkan dapat mampu menyampaikan pelajaran positif dapat menambah pemikiran serta memperkaya ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu menjadi masukan untuk penelitian-penelitian berikutnya dapat juga bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan sebagai bahan pembanding yang berkaitan dengan implementasi program terutama mengenai Program Indonesia Pintar. Pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan di Universitas Medan Area juga dikembangkan dan diimplementasikan melalui penelitian ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi pemikiran dan juga layak memberikan pengembangan dan peningkatan terhadap Program Indonesia Pintar, Serta mampu memberikan terhadap seluruh masyarakat luas tentang pentingnya Program Indonesia Pintar. Adapun bagi penulis diharapkan sebagai mengembangkan wawasan baru mengenai bagaimana implementasi kebijakan program Indonesia pintar dan

meningkatkan kemampuan terhadap menganalisis, menulis, dan mengobservasi dari penulis sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Impementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata.

James P Lester dan Joseph Stewart dalam Indra Muda (2019:76) buku yang berjudul “Implementasi Kebijakan Publik” menyatakan bahwa implementasi dipandang dalam artian yang luas, merupakan alat administrasi hukum yang terdapat berbagai faktor, prosedur, teknik, dan organisasi yang bersama sama untuk mengerjakan kebijakan yang dapat meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Salusu (2021) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu keputusan. Keputusan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan atau sasaran kebijakan. Pencapaian prestasi tersebut membutuhkan kinerja yang sempurna. Dari sini dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah operasi atau fase penting dari berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

James P Lester dan Joseph Stewart dalam Indra Muda (2019:76) buku yang berjudul “Implementasi Kebijakan Publik” menyatakan bahwa implementasi dipandang dalam artian yang luas, merupakan alat administrasi hukum yang terdapat berbagai faktor, prosedur, teknik, dan organisasi yang bersama sama untuk mengerjakan kebijakan yang dapat meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan publik yang telah dirumuskan dalam bentuk program, regulasi, maupun instruksi agar dapat berjalan sesuai tujuan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya tercermin dalam undang-undang, peraturan, atau putusan pengadilan, yang mencakup usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan adalah proses di mana kebijakan yang telah dirumuskan diubah menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Implementasi kebijakan publik dipandang sebagai proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. George C. Edwards III (1980) mengidentifikasi empat dimensi utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap/motivasi pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi kebijakan mencakup saluran dan kejelasan penyampaian arahan kebijakan kepada pelaksana. Sumber daya meliputi dukungan anggaran, peralatan, dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Disposisi atau sikap pelaksana berkaitan dengan motivasi, kompetensi, dan komitmen aparat dalam menerapkan kebijakan. Struktur birokrasi menitikberatkan pada aturan internal organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan fragmentasi tugas yang dapat mempercepat atau menghambat pelaksanaan. Edward berargumen bahwa kombinasi keempat aspek ini saling berkaitan dan bersama-sama menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Merilee S. Grindle (1980) menawarkan perspektif berbeda dengan menekankan dua variabel besar: isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan meliputi: tujuan dan sasaran yang jelas, kelompok sasaran

yang akan menerima manfaat, jenis manfaat yang dijanjikan, serta detail program dan sumber daya yang dialokasikan. Sementara itu, variabel lingkungan mencakup kekuatan kepentingan para aktor yang terlibat, karakteristik institusi penguasa (lembaga dan rezim yang berkuasa), serta respons dan kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut. Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh “*derajat implementability*” kebijakan, yaitu sejauh mana faktor-faktor di atas mendukung tercapainya tujuan.

Menurut model top-down dari Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi sukses implementasi kebijakan publik:

- (a) karakteristik masalah (*tractability*), seperti tingkat kesulitan teknis isu dan cakupan perubahan yang diharapkan;
- (b) karakteristik kebijakan – misalnya kejelasan isi kebijakan, dukungan teori, alokasi sumber daya, serta konsistensi aturan dan komitmen aparat; dan
- (c) variabel lingkungan non-hukum – meliputi kondisi sosial-ekonomi, kemajuan teknologi, dukungan publik, dan sikap kelompok pemilih.

Mereka mendefinisikan implementasi sebagai “pemahaman yang sebenarnya setelah suatu program dinyatakan berlaku, yang mencakup upaya administratif dan penciptaan dampak nyata pada program itu sendiri”. Model ini mempertegas perlunya evaluasi terus-menerus terhadap implementasi dan standar pencapaian tujuan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan melibatkan serangkaian aktivitas yang kompleks, termasuk interpretasi kebijakan, alokasi sumber daya, dan koordinasi antarlembaga. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, implementasi kebijakan e-purchasing bertujuan untuk

memodernisasi proses pengadaan dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dari beberapa definisi para ahli dapat kita ingat definisi implementasi yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses kegiatan yang dikoordinasikan oleh birokrasi untuk menciptakan tujuan yang dapat dicapai oleh pelaksana yang dapat dipercaya. Pelaksanaan adalah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Selanjutnya akan menjelaskan model-model implementasi kebijakan.

2.2 Model Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yang sering digunakan dalam penelitian administrasi publik, yaitu model top-down, bottom-up, dan model sintesis. Model top-down menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan dan kontrol dari pembuat kebijakan di tingkat pusat. Sebaliknya, model bottom-up mengakui peran pelaksana di tingkat lokal dalam membentuk implementasi melalui diskresi dan adaptasi. Model sintesis, seperti yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), menggabungkan elemen dari kedua pendekatan dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti standar kebijakan, sumber daya, dan disposisi pelaksana. Adapun model-model implementasi kebijakan pada perkembangannya, antara lain adalah :

Jones dalam Istamto (1996:296) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) kegiatan utama dalam mengapai program implementasi kebijakan, yakni :

1. Lembaga pendirian atau penataan kembali sumber daya, elemen elemen metode menghasilkan program berjalan.

2. Interpretasi Menjelaskan agar program dalam hal status sebagai rencana dan pengarahan yang akurat dan dapat serta dilaksanakan.
3. Penerapan Ketetapan teratur dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan atas tujuan atau persiapan program.

Van Horn dan Van Meter dalam subarsono (2005:3) mengatakan terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kemampuan kinerja implementasi, antara lain adalah:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (*utopis*), maka akan sulit direalisasikan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*official*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*).

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Tahapan dari keseluruhan proses dalam implementasi ditunjang dengan adanya sumber daya manusia yang bermutu yang sesuai dengan pekerjaan yang terbuka dari kebijakan ditetapkan sebelumnya. Jika suatu kompetensi kapasitas sumber daya tersebut tidak tersedia, maka sebuah

kinerja dari kebijakan publik akan sulit untuk diterapkan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Fokus perhatian pada lembaga pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Ini penting karena kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh pencocokan properti yang benar dengan agen pelaksana. Hal ini relevan dengan konteks kebijakan dimana beberapa kebijakan beroperasi yang membutuhkan pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks Situasi lain membutuhkan badan pelaksana yang demokratis persuasif. Selain itu, luas atau cakupan wilayah tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pejabat pelaksana kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Bila suatu standar tujuan keberhasilan tidak berjalan dengan baik akan sulit mencapai standar dan suatu tujuan kebijakan dari penjelasan para pelaksana, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Kejelasan ini memungkinkan para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang rumit dan kompleks.

5. Sikap Para Pelaksana

Disposisi implementor terdiri dari tiga hal, yaitu:

- 1) *Respons implementor* terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- 2) Kognisi, yakni pemahaman nya terhadap kebijakan.
- 3) Intensitas disposisi *implementor* yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh *implementor*.

6. Lingkungan (sosial, ekonomi dan politik)

Pertimbangan terakhir dalam mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang buruk dapat menjadi sumber kesalahan dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan yang buruk. Oleh sebab itu, upaya implementasi kebijakan memerlukan lingkungan eksternal yang kondusif.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Thomas R. Dye (2013), kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa tindakan nyata, tetapi juga pilihan untuk tidak bertindak terhadap suatu isu.

Pengertian kebijakan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Menurut Gerston (gramedia.com) terhadap kebijakan publik merupakan

daya yang dilakukan oleh pejabat dan pemerintah. Daya tersebut dilakukan setiap kedudukan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik.

Tahapan penentuan sebuah kebijakan publik terdiri dari lima tahapan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sebuah isu kebijakan publik.
2. Mengembangkan proposal kebijakan publik.
3. Melakukan advokasi kebijakan publik.
4. Melaksanakan kebijakan publik.
5. Mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Woll (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Definisi dari Woll dapat dijelaskan kalau kebijakan publik itu merupakan segaris keputusan ke bijaksana yang telah seseorang atau sekelompok agar dapat menciptakan tujuan tertentu di dalam masyarakat.

W.I Jenkins dalam Wahab (2012:15) Mengatakan kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang actor politik atau sekelompok actor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas ke wewenang kekuasaan dari para actor tersebut.

Sementara itu, menurut William N. Dunn (2018), kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah publik, yang meliputi proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi

kebijakan. Dunn juga menekankan bahwa kebijakan publik tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan nilai, kepentingan, serta sumber daya yang ada dalam masyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah instrumen strategis pemerintah untuk mencapai tujuan negara, yang terwujud dalam bentuk keputusan, peraturan, maupun tindakan nyata, dengan melibatkan berbagai aktor dan sumber daya.

2.4 Program Indonesia Pintar (PIP)

Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran keterampilan, pengetahuan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melintasi pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan dapat juga dilakukan secara otodidak, namun sering terjadi di bawah bimbingan orang lain.

Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia merupakan mencerdaskan kehidupan bangsa, dari setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang begitu layak dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial.

Kebijakan Program Indonesia Pintar yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka siswa putus sekolah yang dimana kurang mampu dalam bentuk pemberian bantuan langsung seperti memberikan dana bantuan. Dari program PIP tersebut, Pemerintah berusaha mencegah anak-anak kurang mampu dari putus sekolah melawati Program Indonesia Pintar, pemerintah berharap dapat membantu peserta yang putus sekolah agar dapat melanjutkan kembali ke jenjang pendidikan.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pemerintah mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, dimana dalam hal tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa perluasan akses, kesempatan belajar, dan bantuan uang tunai oleh pemerintah yang disalurkan ke peserta didik yang berasal dari keluarga miskin agar dapat membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

2.4.1 Prinsip Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Prinsip pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) diantaranya adalah :

1. Efisien, ini berarti bahwa dengan memakai dana dan daya yang ada untuk mengapai sasaran yang telah ditentukan dengan waktu sesingkat-singkatnya dan nantinya dapat dipertanggung jawabkan.
2. Efektif, yaitu sesuai dengan dana yang telah di tetapkan lalu dapat memberikan positif besar yang sesuai dengan sasaran.
3. Transparan, yaitu adanya keterburukan memungkinkan masyarakat dapat mengakses, mengetahui dan mendapatkan informasi tentang PIP.
4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.
5. Kepatutan, yaitu kegiatan/program yang dilaksanakan secara nyata.
6. Manfaat, yaitu pelaksanaan dari kegiatan/program yang searah dengan terutama kegiatan nasional.

2.4.2 Sasaran Program Indonesia Pintar

Dana bantuan PIP merupakan program pemerintah untuk mendukung anak sekolah dari umur 6 hingga 21 tahun untuk keluarga tidak mampu, agar dana bantuan PIP ini dapat tersalurkan sesuai yang telah ditetapkan, maka pemerintah

memilih beberapa kriteria peserta didik yang akan mendapatkan bantuan PIP.

Yaitu:

1. Pemilik dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Yatim Piatu.
3. Penyandang disabilitas.
4. Korban bencana alam/musibah.
5. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
6. Anak sekolah usia 6 hingga 21 tahun.
7. Anak-anak tidak bersekolah karena tidak mempunyai biaya.

2.4.3 Kewajiban Penerima Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar menjadi salah satu program pemerintah di sektor pendidikan. Setiap anak-anak miskin berhak menerima bantuan dari program Indonesia pintar. Bahkan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar di program PIP mereka bisa mendaftarkan dirinya selama memenuhi kriteria ketentuan yang berlaku, walaupun diberikan secara gratis tetapi ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi bagi setiap penerima program Indonesia pintar ini. Oleh karena itu untuk mengetahui arti dari program Indonesia pintar ini tidak akan lengkap tanpa mengetahui kewajiban-kewajibannya. Berikut ini langkah-langkah wajib yang harus dipenuhi bagi penerima program PIP.

1. Penerima harus menjaga dan menyimpan Kartu Indonesia Pintar.
2. Bantuan Dana PIP harus digunakan sesuai dengan kewajiban yang diperlukan (kebutuhan pendidikan), contohnya seperti membeli perlengkapan sekolah, dan sebagainya.

3. Siswa sebagai penerima PIP harus tetap menempuh jenjang Pendidikan dan belajar dengan disiplin, tekun, dan rajin.
4. Bila kartu KIP yang diberikan mengalami kerusakan atau pun hilang harus segera melaporkan hal tersebut ke kontak pengaduan PIP.
5. Informasikan nomor KIP yang hilang serta kartu identitas pelajar untuk mendapati penggantian kartu baru.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan bagi penulis selama melakukan penelitian agar memperluas teori yang diambil dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian sebelumnya, penulis mengajukan beberapa penelitian sebagai bahan referensi yang nantinya akan memperkaya bahan kajian dalam penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah (2021) dengan judul “Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone” bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 17 Bone telah berjalan secara optimal. Berdasarkan beberapa indikator implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan yang telah tepat sasaran serta membantu siswa kurang mampu, (2) sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai, (3) komunikasi

antarorganisasi dan pelaksana yang baik, (4) karakteristik agen pelaksana yang memahami prosedur operasional (SOP), (5) disposisi implementor yang melaksanakan kebijakan dengan baik, serta (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung pelaksanaan kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi PIP di lokasi penelitian tersebut telah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Winda Yanti (2018) dengan judul “Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Deli Kecamatan Medan Marelan” bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendistribusian Kartu Indonesia Pintar, khususnya dalam hal komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kantor Lurah Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini mencakup proses pelaksanaan pendistribusian KIP serta hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi pendistribusian KIP telah sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui tahapan pengusulan, penetapan penerima, penyaluran, pengambilan, dan pemanfaatan dana bantuan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam proses sosialisasi dan koordinasi antarinstansi yang menyebabkan keterlambatan distribusi di lapangan.

Bila dibandingkan dengan kedua penelitian tersebut, penelitian penulis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai” memiliki kesamaan dalam hal fokus kajian, yaitu sama-sama membahas implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar serta

menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis fenomena kebijakan di lapangan. Ketiga penelitian sama-sama berupaya menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan bantuan pendidikan pemerintah bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

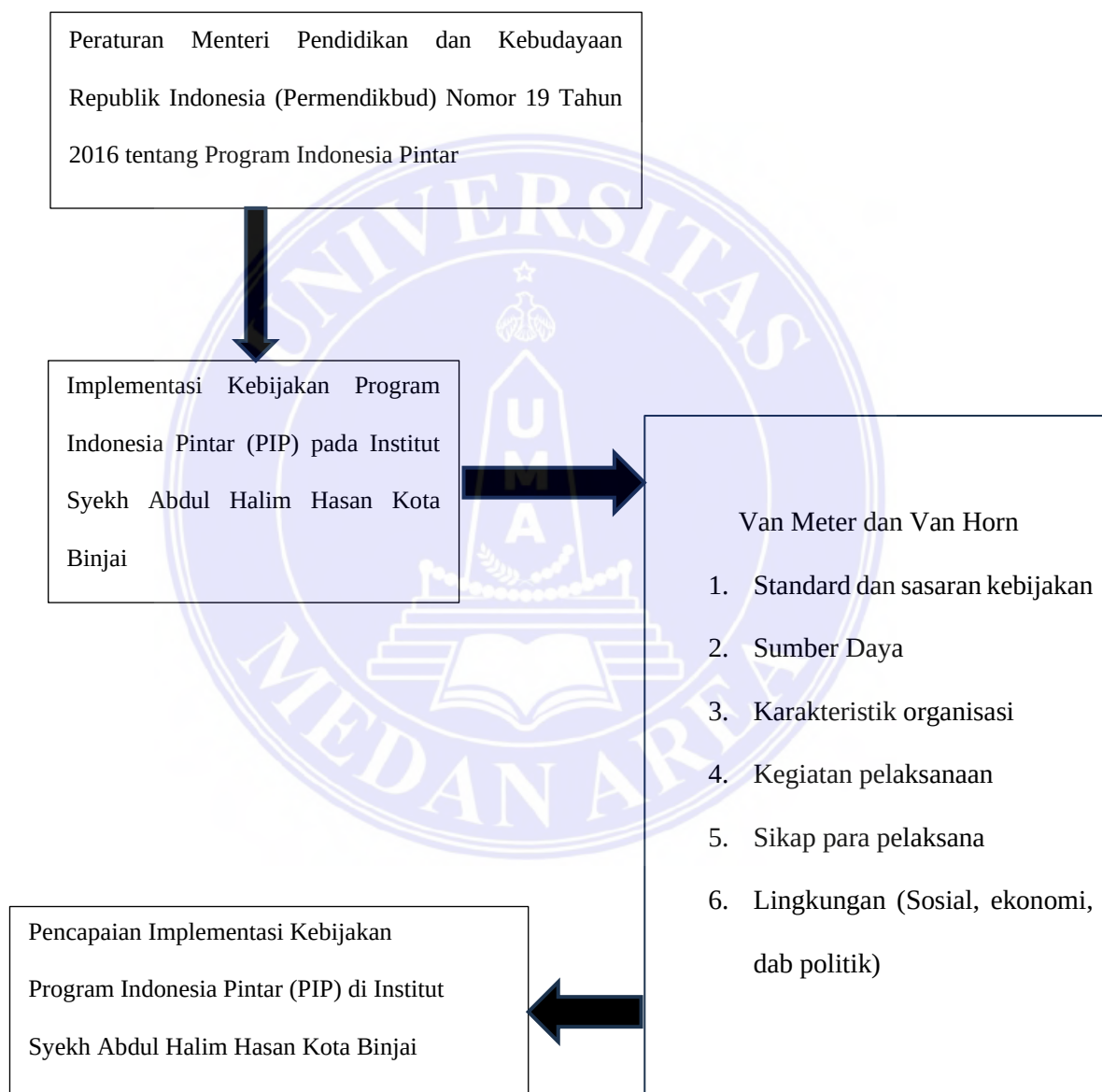
Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dari segi lokus, konteks, dan sasaran kebijakan. Penelitian Nur Azizah (2021) berfokus pada pelaksanaan PIP di jenjang Sekolah Menengah Atas, sementara penelitian Winda Yanti (2018) lebih menitikberatkan pada proses pendistribusian KIP di tingkat kelurahan. Adapun penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan PIP di lingkungan perguruan tinggi, yaitu di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai, sehingga memperluas ruang lingkup kajian implementasi program tersebut hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Penelitian ini juga menilai efektivitas implementasi kebijakan dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan menyesuaikan konteks birokrasi dan mekanisme pelaksanaan di perguruan tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan memberikan perspektif baru mengenai bagaimana kebijakan Program Indonesia Pintar diimplementasikan pada tingkat perguruan tinggi. Jika penelitian Nur Azizah menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan program di sekolah menengah dan penelitian Winda Yanti menyoroti proses distribusi bantuan di tingkat masyarakat, maka penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi kebijakan PIP di lingkungan kampus serta peran institusi pendidikan tinggi dalam mendukung tujuan pemerataan pendidikan melalui kebijakan pemerintah tersebut.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan instrumen pemikiran peneliti dalam melaksanakan sebuah kegiatan penelitian, agar memahami materi penelitian dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Penulisan penelitian dibuat perlu berdasarkan terhadap kerangka pemikiran, sebagai garis besar kerangka pemikiran pada penulisan ini adalah implementasi kebijakan program Indonesia pintar di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai, yang diharapkan program Indonesia pintar ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Dengan ini peneliti yang nantinya melakukan penelitian lebih memilih menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn disebabkan mempunyai 6 variabel yang membentuk ikatan (linkage) antara kebijakan dan pencapaian (performance). Pada 6 variabel tersebut dapat dilihat bahwa apa saja yang sebagai pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan program Indonesia pintar. Berikut ini skema pemikiran dari peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Mengenai implementasi kebijakan program Indonesia pintar (PIP) pada Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai, peneliti melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dikarenakan permasalahan yang diambil bukan dari data angka-angka melainkan data yang berasal dari Observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi. Maka dari hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif berupa kajian terhadap suatu fenomena yang lebih menyeluruh. Menurut Nasution dalam Rukajat (2018:1) dalam buku yang berjudul “Pendekatan Penelitian Kualitatif” mendefinisikan penelitian kualitatif pada hakikatnya yaitu mencermati orang dalam lingkungannya, berinteraksi pada mereka, berjuang memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekelilingnya.

Moleong (2007:9) menyatakan bahwa digunakannya metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sebab beberapa alasan. Pertama, metode ini secara langsung mencerminkan sifat hubungan antara penelitian dan responden. Kedua, metode ini lebih sensitive dan dapat dianalisis lebih lanjut jika memiliki penaruh umum yang besar terhadap nilai bentuk yang di hasilkan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan detail mengenai implementasi program Indonesia pintar pada Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Observasi penelitian ini dilakukan pada Institut Syekh Abdul Halim Hasan yang beralamat Jl. Insinyur H. Juanda No.5, Timbang Langkat, Kec. Binjai Tim., Kota Binjai, Sumatera Utara 20737. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan dari bulan Desember 2023 sampai Februari 2024.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan sumber data yang dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan seluruh informasi, maka dari itu sumber data tersebut terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi langsung dari lapangan melalui informan yang diwawancarai dan telah dipilih oleh peneliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi dari hasil dokumen Institut Syekh Abdul Halim Hasan dokumen resmi berbagai instansi pemerintah dan swasta.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberi peneliti atau pewawancara informasi mendalam tentang diri mereka sendiri atau orang lain tentang suatu peristiwa atau sesuatu permasalahan. Informan penelitian dipilih melalui purposive sampling. Peneliti beranggapan agar informan penelitian dapat memberikan informasi yang lengkap terkait dengan tujuan penelitian.

Adapun informan penelitian ini yaitu orang-orang yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Institut Syekh Abdul Halim Hasan,

maka diperlukan informasi yang mempunyai kepaahaman berkaitan langsung dengan:

1. Informasi Kunci

Informan kunci adalah informan yang berkewenangan dan dipercaya mampu memberikan informasi yang dapat membukakan jalan bagi peneliti untuk mencapai hasil penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan informan dan mencatat hasil wawancara tersebut. Informan kunci yaitu mereka yang memiliki dan mengetahui tentang informasi pokok yang akan diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Agus Salim, M.Pd selaku Wakil Rektor III

2. Informan Utama

Seseorang atau kelompok yang menjadi informan utama ketika memberikan informasi terkait penelitian. Informan utama dapat dipandang sebagai narasumber yang memberikan gambaran tentang masalah penelitian. Yang menjadi informan utama penelitian ini adalah Muslim Hidayat, S.Pd selaku Kabag Akademik di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai.

3. Informan Tambahan

Informan Tambahan yaitu mereka yang mengemukakan masalah tambahan yang menambah pembahasan penelitian dapat disebut sebagai informan tambahan. Informan tambahan untuk peneliti adalah mahasiswa penerima Program Indonesia Pintar di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai, yaitu :

- a) Nazra Ali
- b) Putri Salsabila
- c) Najwa Nur Khaira Hsb
- d) Cut Tami
- e) Shindy Chayana
- f) Faizs Kurniawan
- g) Ario Nugroho
- h) Dewi Sartika
- i) Reva Putri Arfian
- j) Muhammad Dirja Akbar

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif terdiri dari 3 macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun 3 langkah dilakukan peneliti dalam pengumpulan data merupakan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yang digunakan dengan menggunakan metode observasi langsung. Teknik pengumpulan data observasi langsung adalah pengumpulan dengan mengamati atau melihat secara langsung proses pelaksanaan program Indonesia pintar. Dalam observasi langsung, pengumpulan data oleh peneliti tentang objek yang diteliti direkam langsung di tempat terjadinya peristiwa sehingga peneliti berada pada objek yang sedang dipelajari atau diamati. Arikunto dalam Imam Gunawan (2013:143) Mengartikan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati

penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.

2. Wawancara

Slamet dalam Edi (2016:2) dalam buku yang berjudul “Teori Wawancara Psikodignostik” menyebutkan bahwa wawancara merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara merupakan bagian penting dari proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai suatu metode untuk memperoleh informasi (data) dari responden. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan pedoman wawancara dimana masalah dan pertanyaan yang akan ditanyakan sudah ditentukan sebelumnya bagi yang diwawancarai. Tujuan dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan merevisi data hasil observasi di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan berbagai hal tentang subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Peneliti dapat mengumpulkan data melalui dokumentasi dengan mengambil gambar, audio (*record*), dan bahkan video. Sumber daya peneliti dapat diperkuat dengan sumber tersebut. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengambil dokumentasi dari hasil observasi dan hasil wawancara sebagai data sekunder terkait dengan

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan ketika pengumpulan data sedang terjadi dan selesainya terselesaikan pengumpulan data pada periode tertentu. Jogyanto Hartono (2018:49) Mengartikan analisis data yaitu tahapan dilakukan setelah data terkumpul. Dalam riset etnografi, tahap analisis data tidaklah berupa tahapan yang bersifat linear. Pengumpulan data, analisis data dan penulisan data dilakukan secara interaktif

a. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih pokok focus pada hal-hal penting, di cari tema, pola dan membuang yang tidak perlu. Dengan begitu data yang sudah direduksi akan memberikan grafik yang jelas dan peneliti dipermudah untuk pengumpulan data selanjutnya, dan akan mencari bila diperlukan. Farida Nugrahani (2014:174) Mengatakan elemen pertama dari analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi atau seleksi, pemusatan atau pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari segala macam informasi pendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat di lapangan selama proses data mining meningkat. Proses pengurangan ini akan terus berlangsung selama penelitian berlangsung. Implementasinya dimulai dengan peneliti memilih kasus untuk dipelajari.

b. Penyajian data (*Data display*)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkanya. Sebuah representasi data menempatkan data terorganisir ke dalam model relasional

yang membuatnya mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alir, dll. Selain itu, penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Peneliti mendeskripsikan penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan atau *Verification*

Selanjutnya tahapan ketiga dalam analisis data kualitatif setelah penyajian data langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan atau pengecekan berdasarkan reduksi data, dimana jawaban atas permasalahan terdapat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang diterbitkan masih tentatif dan akan berganti kecuali ditemukannya bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di *Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai*, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di *Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai* telah berjalan cukup baik. Program ini terlaksana sesuai dengan pedoman dari Kementerian Agama dan bertujuan membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Pelaksanaan kebijakan telah menunjukkan komitmen yang baik dari pihak kampus dalam memfasilitasi proses administrasi, pendaftaran, hingga pencairan dana bantuan.
2. Berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan PIP telah sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan yang ditetapkan. Namun, efektivitas implementasi masih belum maksimal akibat beberapa kendala teknis dan administratif. Aspek sumber daya manusia, komunikasi kebijakan, serta koordinasi antarunit pelaksana masih perlu diperkuat agar program berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
3. Dari hasil penelitian, ditemukan faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan PIP, yang terbagi menjadi dua kelompok:
 - a. Faktor Internal:
 - a) Kurangnya sosialisasi dan transparansi informasi kepada mahasiswa.

- b) Keterbatasan kemampuan teknis dan pembagian tugas SDM dalam pengelolaan data PIP.
 - c) Lemahnya koordinasi birokrasi antarunit kampus.
 - d) Minimnya fasilitas teknologi informasi dalam proses administrasi program.
- b. Faktor Eksternal:
- a) Keterlambatan pencairan dana dari Kementerian Agama.
 - b) Ketidaktepatan sasaran penerima akibat verifikasi data yang kurang akurat.
 - c) Keterbatasan kuota bantuan dibandingkan jumlah mahasiswa yang membutuhkan.
4. Meskipun demikian, dari sisi lingkungan sosial dan politik, pelaksanaan program didukung dengan baik. Dukungan sosial kampus dan masyarakat terhadap mahasiswa penerima cukup tinggi, serta stabilitas politik daerah yang kondusif turut mendukung kelancaran koordinasi dengan pihak kementerian dan lembaga penyalur dana.

Secara keseluruhan, implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di *Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai* telah berperan penting dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu, meskipun masih perlu dilakukan perbaikan pada aspek teknis dan manajerial agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi Program

Pihak kampus perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur setiap semester, baik melalui media resmi kampus, pertemuan mahasiswa, maupun platform digital. Hal ini untuk memastikan seluruh mahasiswa memahami syarat, mekanisme, dan jadwal pendaftaran PIP dengan jelas.

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Diperlukan pelatihan teknis bagi staf administrasi dan operator data agar lebih memahami sistem pendaftaran dan pelaporan PIP secara daring melalui portal KIP Kuliah Merdeka. Peningkatan kapasitas ini penting agar tidak terjadi kesalahan input dan keterlambatan dalam pengelolaan data.

3. Pembentukan Tim Khusus Pengelola PIP

Disarankan agar kampus membentuk unit atau tim khusus yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar. Tim ini akan berfungsi sebagai penghubung antara mahasiswa, pihak kampus, dan Kementerian Agama sehingga koordinasi dan pelayanan lebih cepat serta tepat sasaran.

4. Optimalisasi Sistem Informasi dan Digitalisasi Data

Kampus perlu mengembangkan sistem informasi beasiswa berbasis digital untuk memperlancar proses pendaftaran, verifikasi, dan pelaporan. Digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan akurasi data penerima manfaat.

5. Perbaikan Mekanisme Verifikasi dan Evaluasi

Diperlukan mekanisme verifikasi yang lebih akurat dengan melibatkan pemerintah daerah setempat (melalui SKTM dan data sosial ekonomi) agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, evaluasi berkala terhadap penerima manfaat perlu dilakukan untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan pendidikan.

6. Koordinasi dan Komunikasi Lintas Lembaga

Pihak kampus diharapkan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama, bank penyalur, serta pihak terkait lainnya agar proses pencairan dana berjalan tepat waktu dan tidak menghambat kebutuhan mahasiswa.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di *Institut Syekh Abdul Halim Hasan Kota Binjai* dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa yang membutuhkan serta mendukung tercapainya pemerataan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1990). *Metode penelitian kualitatif* (Diterjemahkan oleh L. J. Moleong). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Edi, F. R. S. (2016). *Teori wawancara psikodignostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Gerston, L. N. (2014). *Public policy making: Process and principles*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Istamto, R. (1996). *Pengantar kebijakan publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). *Public policy: An evolutionary approach*. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muda, I. (2019). *Implementasi kebijakan publik*. Medan: Media Persada.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Surakarta: Cakra Books.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: Implementasi dan pengendalian kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Salusu, J. (2021). *Pengambilan keputusan strategik*. Jakarta: Grasindo.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. Lexington, MA: Lexington Books.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal :

- Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 12(2), 45–56.
- Istamto, M. (1996). Model implementasi kebijakan publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 291–300.
- Muda, I. (2019). Implementasi kebijakan publik dalam konteks pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 72–83.

Peraturan :

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Skripsi :

Azizah, N. (2021). Implementasi Program Indonesia Pintar pada jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].

Yanti, W. (2018). Implementasi pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Deli Kecamatan Medan Marelan [Skripsi, Universitas Medan Area].

Internet :

Antara Sumut. (2023, Desember 15). INSAN Binjai resmi beralih status menjadi institut. <https://sumut.antaranews.com>

Badan Pusat Statistik. (2023). Data kemiskinan Indonesia Maret 2023. <https://bps.go.id>

Dadangjsn.com. (2015). Pengertian, tujuan, prinsip pelaksanaan, dan sasaran PIP berdasarkan Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia

Pintar. <https://www.dadangjsn.com/2015/07/pengertian-tujuan-prinsip-pelaksanaan.html>

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis). (2023). Petunjuk teknis Program Indonesia Pintar (PIP) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. <https://diktis.kemenag.go.id>

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. (2023). Profil Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. <https://insan.ac.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2015). Arti kata “implementasi” menurut KBBI. <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/implementasi>

Kurniasih, W. (2021). 15 pengertian kebijakan publik menurut para ahli. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik>

Mutiarasari, A. K. (2021). Apa itu dana bantuan PIP: Penyelenggara, tujuan, besaran dana. <https://news.detik.com/berita/d-5855690/apa-itu-dana-bantuan-pip-penyelenggara-tujuan-besaran-dana>

Sekolah Kita. (2022). Temukan informasi sekolah di seluruh Indonesia. <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id>

Tenggulangbaru.id. (2022). PIP Oktober 2022 sudah cair, begini cara cek namamu di pip.kemdikbud.go.id. <https://tenggulangbaru.id/artikel/2022/10/11/pip-oktober-2022-sudah-cair>

Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. (2022). Profil Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. <https://www.ypsim.com/p/profil-y.html>

Kapanlagi Plus. (2022). Arti PIP adalah Program Indonesia Pintar: Ketahui manfaat dan cara mendapatkannya. <https://plus.kapanlagi.com/arti-pip-adalah-program-indonesia-pintar>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Panduan Program Indonesia Pintar. <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id>